

Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam Meningkatkan Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Aceh Barat

Harmaini

Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh, Indonesia

*Email Korespodensi: harmaini@utu.ac.id

Diterima: 01-08-2024 | Disetujui: 02-08-2024 | Diterbitkan: 06-08-2024

ABSTRACT

BULOG was first formed based on Cabinet Presidium Decree Number 114/U/KEP/5/1967 dated 10 May 1967 with the name Bulog Non-Departmental Government Institution (LPND) with the main objective of securing food supplies and stabilizing prices in order to uphold the existence of the new Government. In order to ensure the availability and stability of rice prices, in 1967 the State established Perum Bulog as a state-owned public company operating in the logistics sector. Based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 48 of 2016 concerning the duties of Perum Bulog in the context of national food security, namely securing food prices at the producer and consumer level, managing government food reserves, providing and distributing food, implementing food imports, developing food-based industries, and developing warehousing food. In the field, price instability often occurs, so Bulog needs to anticipate it. Price instability really needs to be paid attention to because it really affects producers and consumers. Prices often soar, so steps and anticipation are needed. This article aims to find out the role of Bulog in increasing food price stability in West Aceh district. The writing method is observational, data analysis includes data reduction, data display, and data verification. The conclusion is that in West Aceh, Bulog's way of increasing food price stability is through Market Operations or SPHP (Food Supply and Price Stabilization), setting HPP (Government Purchase Prices), rice imports, and the food Task Force. Supporting factors in maintaining rice price stability are the establishment of the National Food Agency (Bapanas), to review rice prices in the market, equalize rice reserve stocks, carry out SPHP (Stability of Food Supply and Price) operations, and absorb rice in refineries. rice at prices set by the government, so the existence of this institution really helps Bulog in maintaining and increasing food price stability in West Aceh Regency.

Keywords: *Bulog; Price Stability; Food*

ABSTRAK

BULOG pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Dalam menjamin ketersediaan dan kestabilan harga beras, pada tahun 1967 Negara telah membentuk Perum Bulog sebagai perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang logistik. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang tugas Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional adalah pengamanan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, penyediaan dan pendistribusian pangan, pelaksanaan impor pangan, pengembangan industri berbasis pangan, dan pengembangan pergudangan pangan. Dilapangan, ketidak stabilan harga sering terjadi, sehingga perlu diantisipasi oleh Bulog. Ketidakstabilan harga sangat perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi produsen dan konsumen. harga seringkali melonjak, sehingga perlu langkah dan antisipasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Bulog dalam meningkatkan stabilitas harga pangan di kabupaten Aceh Barat. Metode penulisannya dengan metode observasi, analisis data meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi data. Kesimpulannya adalah di Aceh Barat, cara bulog meningkatkan stabilitas harga pangan adalah dengan Operasi Pasar atau SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), penetapan HPP (Harga Pembelian Pemerintah), impor beras, dan Satgas pangan. Faktor pendukung dalam menjaga stabilitas harga beras adalah karena telah dibentuknya Badan Pangan Nasional (Bapanas), untuk meninjau harga beras di pasar, melakukan pemerataan stok cadangan beras, melakukan operasi SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan), dan melakukan penyerapan beras di kilang-kilang padi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga keberadaan lembaga ini sangat membantu Bulog dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas harga pangan di Kabupaten Aceh Barat.

Kata Kunci : Bulog; Stabilitas Harga; Pangan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Harmaini. (2024). Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam Meningkatkan Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Aceh Barat. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 849-858. <https://doi.org/10.62710/wt976n63>

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan juga merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas sosial-politik suatu negara. Indonesia memiliki kebutuhan sektor pangan yang sangat besar karena jumlah penduduknya tergolong banyak, mencapai kurang lebih 267 juta jiwa, tentunya selalu dijumpai potensi rawan masalah pangan. Pengelolaan pangan untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia sangat memiliki kaitan erat dengan stabilitas sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi di saat semua orang setiap saat memiliki akses baik secara fisik, sosial, dan ekonomi untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi sesuai kebutuhan dan preferensi untuk hidup aktif dan sehat. Apabila dicermati konsep ketahanan pangan tersebut, ketahanan pangan tidak hanya menyangkut aspek jumlah, namun juga menyangkut aspek mutu, keamanan, dan gizi pangan (Sumastuti, 2010).

Menurut Rahman dan Suryani (2010), mengacu dari konsep awal ketahanan pangan dan perkembangannya, pada dasar-nya dalam ketahanan pangan terdapat empat pilar, yaitu: aspek ketersediaan (*food availability*), aspek stabilitas ketersediaan atau pasokan (*stability of supplies*), aspek keterjangkauan (*access to supplies*), dan aspek konsumsi pangan (*food utilization*). Keempat pilar ini mengindikasikan bahwa pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, baik di musim panen maupun masa paceklik, terdistribusi merata di seluruh pelosok negeri, harganya terjangkau oleh orang yang miskin sekalipun, dan aman serta bermutu. Ketahanan pangan dalam arti luas merupakan terjaminnya pangan bagi setiap rumah tangga dan individu pada setiap waktu.

Karena itu ketersediaan pangan secara fisik dan aksesibilitas, yaitu adanya akses ekonomi, yang tercermin oleh harga yang terjangkau masyarakat, merupakan elemen keharusan untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Dalam perjalanannya, sebagai sebuah lembaga yang mengurus lalu lintas beras di Indonesia, Bulog dan beras ibarat dua sisi mata uang. Keduanya seolah sejoli yang tak terpisahkan. Sejak berdiri pada 1967 sampai saat ini, Bulog tak pernah lepas dari urusan beras. Sebagai makanan pokok, beras adalah yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia, sedangkan sebagai komoditi strategis, fluktuasi harga yang terlalu tinggi dapat memberatkan masyarakat dan sekaligus bisa merugikan petani. Oleh sebab itu, dalam menjamin kesejahteraan suatu negara maka hal yang paling penting dilakukan yaitu stabilisasi pangan dan stabilisasi harga pangan. Stabilisasi harga pangan merupakan suatu kondisi dimana telah terpenuhinya pangan suatu negara sampai perseorangan baik dari jumlah, mutu, keamanan, bergizi, merata, dan terjangkau sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

Tujuan dan tugas Perusahaan Umum (Perum) Bulog dirancang mengacu ke konsep pangan dan hak rakyat atas pangan sesuai UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. Tujuan Perum adalah untuk turut serta membangun ekonomi nasional dengan berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan nasional di bidang pangan. Sebagai BUMN, Perum Bulog mendapat tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok dan usaha lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perum didirikan dengan maksud, agar penyelenggaraan usaha logistik pangan pokok menjadi bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu dari pemerintah, khususnya dalam pengamanan harga pangan yang bersifat pokok, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat khusus

Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga, salah satu instrumen kebijakan harga yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Harga dasar ditujukan untuk melindungi petani sebagai produsen dari jatuhnya harga gabah saat panen raya, sedangkan harga maksimum ditujukan untuk melindungi konsumen terutama dari lonjakan harga saat musim paceklik. Konsep harga dasar selanjutnya disesuaikan menjadi harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) per 1 Januari 2022 dan kemudian menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada tahun 2005. Konsep harga maksimum kemudian dituangkan dalam kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.57/M DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Adapun pengadaan beras dalam negeri berawal dari produksi petani.

Dengan adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP), petani menjadi aman dalam melaksanakan usaha tani padinya. Pengadaan dalam negeri menjadi jaminan harga dan sekaligus jaminan pasar atas hasil produksinya. Dengan semangat berproduksinya, produksi padi akan meningkat dan ketersediaan pangan (beras) dalam negeri akan mencukupi. Salah satu pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan (*availability*) dapat tercapai. Esensi dari penerapan HPP adalah untuk memberikan insentif bagi petani padi dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan, terutama pada saat panen raya. Melalui kebijakan HPP pemerintah mengharapkan produksi padi dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri, terciptanya stabilitas harga gabah dan beras di pasaran, serta meningkatkan pendapatan petani padi. Jika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi, maka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga tidak akan terwujud, yang dapat menimbulkan kerapuhan ketahanan pangan di tingkat nasional (Sawit, dkk., 2002).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan, Perum Bulog ditugaskan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga tiga komoditas pangan pokok yaitu beras, jagung dan kedelai. Sementara untuk 8 komoditas pangan lainnya yaitu gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabai, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam dapat ditangani oleh BUMN lainnya atau Perum Bulog atas penugasan melalui Menteri Perdagangan dengan persetujuan Menteri BUMN dan berdasarkan rapat koordinasi. Sesuai Perpres tersebut, Perum Bulog diberikan tugas sebagai berikut: (i) pengamanan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen; (ii) pengelolaan cadangan pangan Pemerintah; (iii) penyediaan dan pendistribusian pangan; (iv) pelaksanaan impor pangan dalam rangka pelaksanaan tugas; (v) pengembangan industri berbasis pangan; dan (vi) pengembangan pergudangan pangan. Pengelolaan pangan yang tepat melalui intervensi pemerintah akan memperbesar akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau dan berkualitas. Sebagai komoditas strategis, campur tangan pemerintah pada stabilisasi harga pangan sangatlah diperlukan, mengingat sasaran utamanya adalah untuk menciptakan stabilisasi harga yang memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor. Pertama, ketidakstabilan harga pangan dapat mengurangi minat investasi.

Stabilisasi harga pangan pokok merupakan masalah penting dan serius bagi sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ketahanan pangan nasionalnya (Khudori, 2000). Program stabilisasi harga beras yang umum dilakukan pemerintah adalah stabilisasi harga antar waktu (*inter-temporal*). Stabilisasi harga antar waktu dibedakan atas dua tipe yaitu variasi harga antar musim dan antar tahun (*intra and inter year*). Pengetahuan mengenai perbedaan tipe variasi harga ini penting dalam penerapan instrumen kebijakan, apakah akan membawa harga ke arah fluktuasi yang ekstrim atau yang normal. Oleh karena itu kedua tipe stabilisasi harga ini masih tetap

dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengintervensi pasar beras domestik ke arah terwujudnya ekonomi perberasan yang lebih adil.

Tugas yang diberikan kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka stabilisasi harga beras merupakan implementasi dari falsafah dasar kebijakan harga beras yang disarankan oleh Mears dan Affif (1969) dan bertumpu pada empat butir, yaitu: (1) mendukung adanya harga dasar (*floor price*) untuk menstimulasi produksi, (2) mengawasi harga atap (*ceiling price*) beras untuk menjamin harga yang terjangkau bagi konsumen, (3) adanya perbedaan harga yang memadai antara kedua harga ini untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi pedagang dan pengusaha penggilingan dalam melakukan penyimpanan beras antar musim panen, dan (4) adanya hubungan yang wajar antara harga beras di pasar domestik dan pasar internasional (Mears, 1982). Kebijakan operasi pembelian beras oleh Bulog pada musim panen dengan menerapkan kebijakan harga dasar (*floor price*), dan menjualnya pada musim paceklik dengan menerapkan kebijakan harga atap (*ceiling price*) bersama-sama dengan kebijakan pengadaan stok penyangga dan impor bertujuan untuk meredam fluktuasi harga beras antar musim dan antar tahun.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran Perum Bulog Provinsi Aceh dalam meningkatkan stabilitas harga pangan di Aceh Barat. Untuk mengetahui bagaimana peran Bulog dalam stabilisasi harga pangan ini, maka penulis menggunakan teori peran. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai, maka ia menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki posisi dalam struktur sosial tertentu. dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karna posisi yang didudukinya tersebut, artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Tidak hanya itu, konsep tentang peran menurut Komarudin dalam buku Ensiklopedia Manajemen mengungkapkan sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian utama fungsi seseorang dalam kelompok atau menjadi karakteristik yang apa adanya.
4. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Menurut Horoeopetri, Arimbi dan Santosa mengungkapkan bahwa dalam peran terdapat beberapa dimensi mengenai peran, diantaranya yaitu:

1. Peran sebagai suatu kebijakan, pengaruh, paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi, penganut peran ini merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapat masukan berupa informasi dan proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh

suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan referensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.

4. Peran sebagai alat menyesuaikan sengketa, suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dan pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka dan bukan komponen penting dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran adalah sebuah tindakan atau perilaku seseorang dalam masyarakat yang menduduki posisi tertentu di sebuah organisasi atau masyarakat dalam status sosial. Peran juga bisa diartikan sebagai pembagian kedudukan kepada pemegang jabatan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan posisinya.

Pendekatan dalam penulisan ini bersifat deskriptif yaitu rangkaian kegiatan mulai dari mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, serta menarik kesimpulan secara akurat dan sistematis yang berkenaan dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data – data dan analisa data yang dilakukan, beberapa peran yang dilakukan oleh Bulog untuk stabilisasi harga pangan di Aceh Barat adalah :

1. Dengan melakukan penyerapan beras. Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Meulaboh Kabupaten Aceh Barat melakukan penyerapan beras medium sebanyak 500 ton untuk melakukan stabilisasi harga beras sebagai kebutuhan pangan utama masyarakat. Serapan beras yang dilakukan ini untuk stabilisasi harga dan menjaga stok beras pemerintah. Serapan tersebut dilakukan sehubungan dengan sudah memasuki musim panen raya oleh petani di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, Provinsi Aceh. Harga penyerapan beras yang dilakukan sebesar Rp 8.300 per kilogram beras dengan kualitas medium. Serapan tersebut dilakukan agar harga jual beras di masyarakat tidak jatuh dibawah harga pokok penjualan (HPP) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Serapan yang dilakukan ini adalah juga agar harga gabah tidak jatuh dan petani juga bisa mendapatkan harga yang pantas.
2. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menambah stok beras impor. pada tanggal 29 Maret 2024, Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Provinsi Aceh mendapat tambahan stok beras impor asal Thailand sebanyak 6.000 ton, yang masuk di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara. Stok ini akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) dan kebencanaan. Dengan tambahan stok beras impor tersebut maka persediaan yang ada di seluruh gudang Perum Bulog Aceh sebanyak 19.250 ton diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan. Selain impor beras dari Thailand ini, Bulog Provinsi Aceh juga akan mendapatkan tambahan stok beras impor dari Vietnam sebanyak 4.900 ton. Semua stok yang ada ini akan digunakan untuk keperluan bantuan pangan, SPHP, kebencanaan dan program pangan lainnya

*Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam Meningkatkan Stabilitas Harga Pangan
di Kabupaten Aceh Barat
(Harmaini)*

dalam upaya stabilisasi harga pangan. Pihaknya juga akan terus membeli hasil panen milik petani di Aceh melalui mitra perusahaan untuk memenuhi kebutuhan beras di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu, sehingga ketika semua kebutuhan beras terpenuhi, maka harga juga akan stabil.

3. Menyalurkan secepatnya beras SHPP (Satuan Harga Pangan Pemerintah). Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), ditujukan ke pasar dan pedagang tradisional, sehingga dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga murah dan terjangkau. Saat ini stok beras cadangan pemerintah yang dimiliki Perum Bulog Meulaboh, Aceh mencapai 813.555 kilogram atau sekitar 813,5 ton beras. Dalam waktu dekat juga akan menerima pasokan tambahan beras sebanyak 2 juta kilogram beras atau sekitar 2.000 ton beras, sehingga dengan adanya penambahan tersebut diharapkan stok beras cadangan pemerintah akan semakin aman dan terkendali. Seperti diketahui, beras SPHP selama ini ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, sementara penyaluran bantuan pangan beras diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Suhadi menyebutkan, selain mendorong penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar dan pedagang tradisional, Perum Bulog Cabang Meulaboh juga bersama PT Pos juga terus mempercepat penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram ke masing masing keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran beras tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat kurang mampu, agar mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah guna memenuhi kebutuhan pangan harian
4. Menjemput bola kepetani, tidak hanya beras, tetapi juga gabah ditingkat petani. Berdasarkan data prakiraan produksi GKG (Gabah Kering Giling) dari BPS periode bulan Maret – April, Provinsi Aceh mempunyai produksi GKG sebesar 425 ribu ton. terkait ini juga ada dua skenario yang dilakukan yaitu grand master plan kegiatan supply chain dan pelayanan publik Bulog yaitu menjaga stock beras Cadangan Pemerintah, penyediaan stok sesuai kebutuhan penjualan, kualitas standar dan harga kompetitif serta sinergi dengan mitra kerja untuk meningkatkan jaminan pasokan dan efisiensi biaya persediaan. Perum Bulog memang harus selektif dalam melakukan penyerapan gabah beras dan memaksimalkan kegiatan jemput bola ke petani guna mendapatkan stok sesuai yang dibutuhkan untuk kegiatan penjualan ataupun penyaluran lainnya, dengan tambahan serapan dari Meulaboh, sebanyak 500 ton, maka total serapan beras Bulog dari Petani sudah sebanyak 30 ribu ton.

Selain itu Bulog juga akan memaksimalkan strategi pengadaan dalam negeri saat puncak panen raya pada bulan Maret – April sebagai upaya memperoleh jaminan pasokan beras PSO dan menjaga stok beras CBP/PSO sesuai penugasan yang diberikan. Selanjutnya Bulog juga melakukan pengadaan GKG dengan Sistem Kontrak / Perjanjian Terikat dengan Mitra Kerja Pengadaan (MKP). Sampai saat ini stok yang dikuasai Bulog hampir mencapai 1 juta ton, dan saat panen raya nanti Bulog akan dapat menyerap secara maksimal gabah beras dari petani guna menjaga stabilisasi harga di tingkat petani dan mencukupi kebutuhan stok sesuai penugasan dan kebutuhan penyaluran. Dengan pengaplikasian sistem Supply Chain Management yang digunakan dalam mengintegrasikan rencana penjualan dan pasokan dengan

tetap memperhatikan rencana bisnis (penyaluran, penjualan, pengolahan, pengadaan, produksi dan keuangan) kedalam suatu rencana terpadu diharapkan kedepannya BULOG agar lebih optimal dalam melakukan penyerapan beras/gabah melihat dari peluang pasar di masyarakat sehingga dapat terus menjaga stabilitas harga pangan dimasyarakat

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh dengan menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras antara lain: Operasi pasar dengan adanya pasar murah, Penerapan HPP (Harga Pembelian Pemerintah), adanya impor beras, dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pangan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
2. Ketidakstabilan harga beras tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sedang mengalami musim paceklik, kelangkaan beras, tingginya jumlah permintaan beras di luar Provinsi Aceh, kenaikan harga BBM, dan situasi politik maupun situasi dunia yang sedang tidak baik.
3. Peran Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh dalam menjaga stabilitas harga beras itu hanya sebagai operator atau pelaksana kebijakannya sedangkan yang berfungsi sebagai regulator atau pembuat kebijakannya adalah Badan Pangan Nasional.
4. Adapun faktor pendukung dalam menjaga stabilitas harga beras adalah telah dibentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bertujuan membantu dalam proses stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya beras. Tidak hanya itu, dengan melihat harga beras di pasar, melakukan pemerataan stok cadangan beras, melakukan operasi SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), dan melakukan penyerapan beras di kilang-kilang padi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya permainan pedagang beras di pasar dimana beras yang telah didistribusikan oleh pemerintah untuk penetrasi harga dijual kembali ke luar Aceh karena harga jual yang lebih tinggi. Selain itu, laju inflasi yang tinggi, faktor bencana alam seperti gagal panen, banjir. Meskipun demikian, jika terjadi bencana alam Bulog telah mengalokasikan stok cadangan beras sebesar 100 ton pertahun untuk setiap kabupaten/kota dan 200 ton pertahun untuk setiap provinsi.

Saran

1. Kepada Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh untuk terus memaksimalkan program ataupun kebijakan dalam menstabilkan harga pangan khususnya di Kabupaten Aceh Barat demi tercapainya ketahanan pangan nasional.
2. Kepada Gapoktan agar terus menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait teknik menanam padi, pemberian pupuk yang tepat, pemilihan bibit yang unggul, serta cara membasmi hama maupun penyakit agar dapat meningkatkan produksi beras dalam negeri.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti hal yang sama dengan perspektif yang berbeda sehingga akan melahirkan ide atau inovasi baru.

*Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam Meningkatkan Stabilitas Harga Pangan
di Kabupaten Aceh Barat
(Harmaini)*

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada LPPM-PMP Universitas Teuku Umar dan Perum Bulog Aceh Barat atas dukungan yang diberikan. Melalui kerjasama yang terjalin, penulis dapat mengikuti praktik kerja dan melakukan observasi yang sangat bermanfaat untuk kelancaran penelitian ilmiah ini.

REFERENSI

- Amang, B. (1995). Kebijakan Pangan Nasional. Jakarta: Dhama Karsa.
- Amrullah, Sabaruddin. (2013). Kebijakan Ekonomi Beras Indonesia. Jakarta: Puslit-bang Bulog.
- Bungin, Burhan. (2011). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Andiojaya, A. (2021). Transmisi Harga Gabah Terhadap Harga Beras: Tinjauan Arah, Besaran Dan Lama Perubahan. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 140-154.
- Arifin, B. (2020). Ekonomi Beras Kontemporer: Data Baru, Tantangan Baru. Edisi Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Aryani, Desi. (2021). Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia: Waktu Efektif yang Dibutuhkan. Jurnal Pangan. Vol. 30. No.2.
- Faesar, Sanafiah. (2002). Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial. Surabaya: Usaha Nasional
- Faruq, B., & Hirotada, K. (2023). Distribusi Beras Murah Untuk Masyarakat Oleh PT. Jatim Grha Utama Dalam Gelaran Operasi Pasar Lumbung Pangan. Bumi : Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat, 13-23.
- Haq, Muh. Nasrul. (2021). Evaluasi Kinerja Perum Bulog dalam Pengendalian Harga Beras di Kabupaten Sinjai. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Harahap, S. H., Ridwan, M., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Peran Bulog Dalam Kebijakan Stabilitas Harga Beras Pada Kerangka Maqashid Syariah (Studi Kasus Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut). Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan, 60-70.
- Horoepoetri, dkk. (2003). Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan. Jakarta: Walhi.
- Komarudin. (1994). Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- <https://acehprov.go.id/berita/kategori/ekonomi/redam-kenaikan-harga-beras-bulog-aceh-lepas-1533-ton-beras-operasi-pasar>
- <https://dialeksis.com/aceh/stok-mencapai-20000-ton-bulog-aceh-jamin-persediaan-beras-aman-hingga-lebaran/>
- <https://hargapangan.id/tabel-harga/pasar-tradisional/komoditas> 70
- Khudori. (2010). Kondisi Pertanian Pangan Indonesia. Pangan, 19(3), 211–232.
- Masbar, R., Noviar, H., Aliasudin, & Syahnur, S. (2020). Komersialisasi Padi dan Beras Menuju Kesejahteraan
- Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuryanti, S. (2017). Swasembada Beras Berkelanjutan: Dilema Antara Stabilisasi Harga Dan Distribusi Pendapatan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 19-30

- Octania, Galuh. (2021). Peran Pemerintah Rantai Pasok Beras Indonesia. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.
- Peraturan Perundang-Undangan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
- Petani. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. Medah, M., & Namah, C. N. (2020). Analisis Stabilitas Harga Beras Di Kota Kupang. Partner, 1160-1165. Neman, A. F., Singkoh, F., & sumampow, I. (2022). Efektifitas Program Operasi Pasar Pemerintah Provinsi
- Rahmawaty, Dwi Tirta Ayu. (2020). Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Salasa, Andi Rachman. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 13. No.1.
- Sarjono, Soekanto. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Septiadi, Dudi, dkk. (2019). Pengaruh Kebijakan Perberasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol. 13. No.2. SOCA: Jurnal Sosial EKonomi Pertanian, 1-14.
- Sitorus, E. A. G. (2022). Pengaruh Covid-19 terhadap harga beras, nilai tukar petani dan kemiskinan di wilayah. Jurnal Ilmiah Terpadu (Jimetera), 43-49
- Sugiyono. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tangkudung, Anggun Juwita. (2016). Analisis Penerapan dan Manajemen Strategi Distribusi Beras di Perusahaan Umum Badan Logistik (Perum Bulog Sub Divre Kota Gorontalo). Jurnal Ilmiah Agribisnis. Vol. 1. No.1.
- Walgito, Bimo. (2003). Psikologi Sosial. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yulianthi, dkk. (2021). Analisis Formulasi Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Pangkep. Jurnal Paradigma Administrasi Negara. Vol. 4. No.1.
- Yuliarthi, Juharni, & Nurkaidah. (2021). Analisis Formulasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019. Jurnal Ekonomi Manajaemen dan Sosial, 20-28.